

Jurnal

MASYARAKAT DAN BUDAYA

ISSN 1410 - 4830
E-ISSN 2502 - 1966

Terakreditasi No. 664/AU3/P2MI-LIPI/07/2015

Volume 20 No. 1 2018

Eksplotasi Pekerja Anak Penambang Timah oleh Orang Tua di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Putra Pratama Saputra

Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, dan Tetap Melangkah Lokal": Prospek Kampung Naga Menjadi Desa Adat

Maulida Illiyani

Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Rusman Nurjaman

Meta-Etnografi Budaya Persalinan di Indonesia

Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina

Perdagangan Budak di Bali Pada Abad Ke XVII-XIX: Eksploitasi, Genealogi, dan Pelarangannya

I Wayan Pardi

"De Particuliere Sadja": Kelas Menengah Kota dan Politik Kewargaan di Kota Kolonial Surabaya Akhir Abad Ke-1975

Andi Achdian, Erna E. Chotim

Dekonstruksi Stereotip Eksklusivitas Etnis Tionghoa dalam Cerpen Clara Karya Seno Gumira Ajidarma

Moch. Fikri

Kerukunan Berlandaskan Tradisi dan Toleransi Keberagamaan: Pembelajaran dari Komunitas Desa Probur Utara, Nusa Tenggara Timur

M. Azzam Manan

Penelitian Sosial Budaya Maritim Pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Sumbangannya pada Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan

Masyhuri Imron dan Ary Wahyono

Kajian Awal Analisis Hub-Pengetahuan: Studi Tentang Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)

Widjajanti M. Santoso



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN
(P2KK-LIPI)

Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 20 No. 1 Tahun 2018

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
✂ Eksploitasi Pekerja Anak Penambang Timah oleh Orang Tua di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia <i>Putra Pratama Saputra</i>	1
✂ “Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, dan Tetap Melangkah Lokal”: Prospek Kampung Naga Menjadi Desa Adat <i>Maulida Illiyani</i>	15
✂ Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa <i>Rusman Nurjaman</i>	31
✂ Meta-Etnografi Budaya Persalinan di Indonesia <i>Weny Lestari dan Zulfa Auliyati Agustina</i>	49
✂ Perdagangan Budak di Bali Pada Abad Ke XVII-XIX: Eksploitasi, Genealogi, dan Pelarangannya <i>I Wayan Pardi</i>	61
✂ “De Particuliere Sadja”: Kelas Menengah Kota dan Politik Kewargaan di Kota Kolonial Surabaya Akhir Abad Ke-19 <i>Andi Achdian, Erna E. Chotim</i>	75
✂ Dekonstruksi Stereotip Eksklusivitas Etnis Tionghoa dalam Cerpen <i>Clara</i> Karya Seno Gumira Ajidarma <i>Moch. Fikri</i>	91
✂ Kerukunan Berlandaskan Tradisi dan Toleransi Keberagamaan: Pembelajaran dari Komunitas Desa Probur Utara, Nusa Tenggara Timur <i>M. Azzam Manan</i>	105
✂ Penelitian Sosial Budaya Maritim Pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Sumbangannya pada Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan <i>Masyhuri Imron dan Ary Wahyono</i>	123
✂ Kajian Awal Analisis Hub-Pengetahuan: Studi Tentang Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) <i>Widjajanti M. Santoso</i>	143
Tinjauan Buku:	
✂ Membungkus Api Dalam Puisi Bayu Teguh Pambudi	165



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
(P2KK - LIPI)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710
Telp./Fax. 021-5701232

"DE PARTICULIERE SADJA": KELAS MENENGAH KOTA DAN POLITIK KEWARGAAN DI KOTA KOLONIAL SURABAYA AKHIR ABAD KE-19

"DE PARTICULIERE SADJA": URBAN MIDDLE CLASS AND THE CITIZEN POLITICS IN THE COLONIAL CITY OF SURABAYA IN THE LATE OF 19TH CENTURY

Andi Achdian, Erna E. Chotim
Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional, Jakarta
angdhiri@gmail.com, ernachotim@yahoo.com

Abstract

In the last three decades, civil society and citizenships has become key terms that entered the debates and discussions about the prospects of democratization in Indonesian society under the New Order regime in 1990s. However, due to the lack of historical perspectives and evidences, the debates and discussions about civil society and citizenships tems in the academic discourse in Indonesia has increasingly been left behind in the literatures. By focusing its analyses to the development of colonial city of Surabaya in the late nineteenth to the early twentieth century under the Dutch colonialism, this article seeks to highlight an interesting aspects that was neglected in the debates. This article presented the idea that the spatial aspect of the city and the dynamic development of city politics has become a crucial aspect in the development of strong civil society and the politics of citizenships in the Dutch colony at the time.

Keywords: Surabaya, colonial city, middle-class, citizenships, civil society

Abstrak

Dalam kepastakaan kontemporer di Indonesia, konsepsi tentang masyarakat sipil dan politik kewargaan telah menjadi tema penting yang mengisi kepastakaan ilmu sosial dan politik di Indonesia sejak dekade 1990an dalam menghadapi dominasi kekuasaan pemerintahan otoriter Orde Baru. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam perkembangan konsep tersebut dengan ketiadaan rujukan historis dalam pengalaman sejarah Indonesia. Dengan menguraikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, tulisan ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut dengan menunjukkan dimensi penting ruang kota dan praktik politik yang muncul di dalamnya sebagai landasan penting bagi kemunculan masyarakat sipil yang kuat untuk mewujudkan konsepsi ideal politik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari warga. Perspektif kesejarahan menjadi unsur penting dalam memberikan sumbangan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan penggalian terhadap sumber-sumber sejarah dari berbagai berita dan opini di dalam surat kabar berbahasa Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta analisis yang berangkat dari sudut pandang lokal di lingkungan Kota Surabaya yang berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan di pusat pemerintahan Batavia. Tulisan ini mengungkapkan bagaimana pengaruh konsepsi kewargaan modern dari pengalaman politik Eropa mendapatkan tempat pertumbuhan yang subur di lingkungan perkotaan Hindia-Belanda saat itu. Pembahasan yang muncul dalam tulisan ini diharapkan dapat merangsang pembicaraan dan debat akademis di Indonesia terkait konsepsi tersebut seiring konteks perkembangan masyarakat Indonesia yang secara demografis berkembang menjadi masyarakat kota dalam waktu satu dekade ke depan.

Kata kunci: Surabaya, kota kolonial, kelas menengah, masyarakat sipil, politik kewargaan

Apakah kita harus terus-menerus memohon kepada pemerintah untuk mengatasi bau hawa beracun yang keluar dari pipa air dari sungai Krambangan yang tidak layak bagi kesehatan di lingkungan tempat tinggal kita? Apakah kita harus kembali meminta penambahan jumlah tempat tinggal bagi orang-orang Eropa yang terpaksa menyewa tempat tinggal mereka dari penduduk lokal dengan harga yang mahal? Apakah kita akan terus membiarkan hidup dalam kegelapan ketika malam tiba? ...

Apakah semua urusan itu dapat diselesaikan hanya dengan dua wakil pemerintah pusat, yang pertama sebagai pegawai keresidenan yang membawahi jutaan penduduk, dan satunya lagi kepala polisi yang membawa korps polisi dengan sedikit orang-orang Eropa di dalamnya? Apabila memang persoalannya

terletak pada ketiadaan dana lokal untuk mengurus semua itu, apakah masuk akal jika pemerintah meminta dukungan warga kota, untuk bersama-sama membentuk dewan kota. Bagaimana jika kemudian dewan kota itu mengeluarkan aturan memungut pajak lokal untuk membiayai penerangan kota, polisi, dan pemeliharaan infrastruktur kota?

(“Het Gemeenteleven Op Java in de Europeesche Maatschappij”, *De Oostpost*, 03 Juni 1858)

Pendahuluan

Sejumlah studi dalam kepustakaan sejarah Indonesia modern telah memfokuskan perhatian dan analisisnya terhadap bekerjanya kekuasaan kolonial dan tanggapannya terhadap kemunculan kaum terpelajar dan ide nasionalisme Indonesia sepanjang empat dekade akhir kekuasaan kolonial Belanda. Fokus perhatian tersebut membentuk kerangka pengetahuan yang mempertentangkan antara aparat kekuasaan negara kolonial yang berpusat di Batavia sebagai pusat administrasi pemerintah kolonial berhadapan dengan agenda politik kaum nasionalis Indonesia sejak kemunculan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di kalangan terpelajar pribumi. Tidak dapat disangkal, sejak berkembangnya, konsepsi penulisan sejarah nasional yang menempatkan orang-orang Indonesia sebagai aktor utama dalam panggung sejarah, atau yang dikenal dengan nama pendekatan *Indonesiasentris*, pandangan tentang bagaimana bekerjanya politik kolonial telah dibangun dalam kerangka yang mempertentangkannya dengan kedudukan dan posisi orang-orang Indonesia di dalamnya. Dalam kerangka ini, pergerakan antikolonial dari orang-orang Indonesia adalah antitesis utama dari politik kolonial pemerintah Hindia-Belanda.

Meski pendekatan ini telah menghasilkan sejumlah karya penting dalam melihat perkembangan politik Indonesia modern akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi pendekatan ini meniadakan sama sekali kisah tentang orang-orang Eropa atau Belanda dalam pembentukan modernitas kolonial abad ke-19 dan awal abad ke-20 hanya memberikan satu sisi saja kekayaan pengalaman sejarah yang membentuk wujud Indonesia modern sekarang ini. Dengan berfokus pada perkembangan yang terjadi di Kota Surabaya pada paruh kedua abad ke-19, dan menggali sumber-sumber yang tersedia tentang kiprah warga Eropa partikelir di lingkungan kota itu, tulisan ini menawarkan suatu gambaran lain yang menarik tentang persoalan penting yang melatari proses pembentukan kota-kota modern di Indonesia, terutama Kota Surabaya yang pada periode itu muncul sebagai pusat industri dan perdagangan yang utama di koloni Hindia-Belanda. Seperti disampaikan Onghokham

(1985) dalam ulasannya tentang runtuhnya Hindia-Belanda, mengangkat kembali kiprah dan posisi orang-orang Eropa dalam proses awal yang mengiringi perkembangan modernitas kolonial di Hindia-Belanda, tulisan ini menunjukkan bahwa paling tidak “mereka pernah ada” dan turut menjadi bagian yang membentuk arah perkembangan modern masyarakat Indonesia.

Awal Perkembangan Modern Surabaya

Meski Kota Surabaya memiliki sejarah panjang yang menyusur sampai akhir abad ke-13, seperti yang kemudian menjadi hari jadi kota itu sekarang ini, tetapi perkembangan modern kota itu terjadi secara cepat di bawah kolonialisme Belanda pada abad ke-19 sampai beberapa dekade awal abad ke-20. Sebagai upaya memberi konteks terhadap seluruh perkembangan yang terjadi pada awal abad ke-20, bagian ini akan menguraikan pola-pola utama yang muncul dalam perkembangan sejarah kota tersebut. Bagian pertama tulisan ini akan menyampaikan awal perkembangan kota sepanjang periode prakolonial yang menyusur sampai abad ke-14 ketika kota itu masih menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan pedalaman Majapahit sebelum kemudian ia menjadi negara kota yang merdeka setelah keruntuhan Majapahit.

Sejarawan kota Surabaya, G.H. von Faber (1931), menyebutkan bahwa Surabaya sebagai kota pelabuhan di ujung timur pulau Jawa memiliki riwayat panjang yang menyusur sampai 1275 M, ketika Raja Kertanegara membentuk pemukiman bagi pasukannya di wilayah Surabaya sekarang setelah penumpasan pemberontakan Kemuruhan pada 1750 M. Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menetapkan hari jadi kota itu pada 31 Mei 1293 yang bertepatan dengan kemenangan pasukan di bawah pimpinan Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol yang bersauh di muara sungai Kalimas sekarang ini.

Angka-angka tahun tersebut dalam kaitan ini memberi petunjuk tentang riwayat sejarah panjang kota tersebut sepanjang periode

prakolonial. Sumber-sumber sejarah lama yang berasal dari abad ke-14 memberikan keterangan tentang arti penting kota tersebut sebagai bagian kerajaan Majapahit yang mengarah ke selatan di sekitar wilayah Mojokerto sekarang ini seperti disebutkan dalam Prasasti Trawulan I dan Kakawin Nāgarakṛtāgama, termasuk juga dalam uraian sumber-sumber Tionghoa era dinasti Yuan dan Ming yang menyebut kota-kota pelabuhan seperti Tuban (*Tu-ping-tsu*), Sidhayu (*Sugalu*), Grêsik (*Ts'e-ts'un*), Surabaya dan Kalimas (*Patsieh*) (Djafar, 2009: 73-74).

Perubahan penting yang terjadi sepanjang periode sejarah prakolonial Surabaya adalah peralihannya sebagai wilayah bawahan Majapahit menjadi negara kota merdeka seiring dengan perkembangan kejayaan perdagangan maritim di nusantara. Perkembangan tersebut terekam dalam sumber-sumber Eropa abad ke-16 yang menyebutkan bahwa di kota itu terdapat sekitar “tiga puluh ribu tentara” bersiap menghadapi ancaman militer kerajaan perdalaman Mataram. Sementara itu, jumlah penduduk seperti tercatat dalam *Daghregister* diperkirakan mencapai sekitar “lima puluh sampai enam puluh ribu orang” (Schrieke, 1966: 19-25).

Sisi menarik dari catatan itu adalah perkiraan jumlah penduduk yang menggambarkan kehidupan lingkungan kota pelabuhan yang ramai dengan jumlah mencapai setengah jumlah penduduk Kota Surabaya memasuki awal abad ke-20 yang mengesankan perkembangan kota tersebut sebagai kota yang cukup ramai. Laporan lain dari abad ke-17 memberi gambaran menarik tentang kehidupan perkotaan di pulau Jawa yang menyebutkan keberadaan pemukiman dalam garis lingkaran seluas “lima mil” sampai batas Jembatan Merah yang dikelilingi tembok pertahanan dan separuhnya lagi dengan ongkongan tanah (*bahuwanti*) yang berfungsi sebagai pertahanan militer. Tembok kota dilindungi benteng-benteng kecil yang dilengkapi 10 sampai 20 meriam yang melindunginya dari serangan pihak luar. Tempat tinggal raja terdapat di bagian barat sungai Kalimas dengan pasar dan bengkel konstruksi untuk membuat meriam. Di dalam laporan ini pula disebutkan keberadaan orang-orang Eropa yang turut membantu pertahanan kota itu (De Graaf, 2002: 16-19).

Sumber-sumber Eropa dalam kaitan ini memberikan dua hal penting terkait perkembangan Kota Surabaya sepanjang periode kejayaan

perdagangan maritim nusantara. *Pertama* adalah lingkungan kota yang tumbuh di sekitar muara sungai Kalimas sebagai pusat awal perkembangan kota Surabaya. *Kedua* adalah gambaran yang menampilkan tata-kelola masyarakat perkotaan yang sebanding dengan pola kehidupan kota-kota abad pertengahan di Eropa dengan tembok-tembok kota di bawah perlindungan seorang bangsawan atau raja sebagai dasar perkembangan modernitas Eropa menuju revolusi industri abad ke-17.¹ *Ketiga* adalah sistem pembagian kerja dalam masyarakat yang telah berkembang melalui keberadaan industri skala rumahan seperti jahitan bordir, pemintalan, pembuatan batik, kerajinan emas dan perak. Sistem pembagian kerja ini juga terdistribusi di wilayah-wilayah kota yang berbeda di seperti para tukang dan tenaga ahli perkapalan di wilayah pertukangan, para pembuat jam di Tjantian, produksi furnitur di Pasepan, pembuatan batik di Kampung Baru, penjahit pakaian di Ampel dan sebagainya yang mengesankan kehidupan kota praindustri melalui kehadiran para artisan yang trampil dalam bidang-bidang teknis tertentu.² Dalam kaitan ini, satu ciri penting perkembangan Kota Surabaya sepanjang periode prakolonial menampilkan gambaran menarik perkembangan kota praindustri di Jawa saat itu.

Bagaimanapun, kedudukan Surabaya sebagai negara-kota merdeka tidak bertahan lama. Kota itu pada akhirnya takluk menjadi bawahan kerajaan perdalaman dari dinasti Mataram di Jawa Tengah setelah menghadapi serangkaian invasi militer pada awal abad ke-18. Kekuasaan dinasti Mataram di kota itu bagaimanapun tidak mengakhiri gejolak yang menjadi faktor instabilitas yang mengancam

¹Boomgard dalam ulasannya tentang sejarah sosial-ekonomi masyarakat Jawa pada abad 18 dan 19 menyatakan bahwa ia lebih suka menggunakan istilah kota yang merujuk “kota kecil, dan tidak memiliki konotasi Eropa berupa adanya tembok yang mengelilingi, benteng dan seterusnya.” (Lihat Boomgard, 2004: 192). Bagaimanapun, laporan-laporan tentang perkembangan kota Surabaya sebelum terbentuknya pemukiman orang-orang Eropa sudah memberi kesan tentang bentuk kehidupan perkotaan prakolonial dengan tembok dan benteng pertahanan yang melindungi kota.

²Sukko Kim dalam makalahnya memberikan gambaran menarik kaitan antara sistem pembagian kerja di dalam masyarakat dengan pertumbuhan kota-kota pada masa awal industrialisasi Amerika Serikat. (Kim, 2006).

kekuasaan dinasti Mataram seperti ditunjukkan melalui pemberontakan Trunajaya. Dengan dukungan VOC, Susuhunan Surakarta menumpas pemberontakan tersebut. Sebagai balas jasa, Susuhunan Surakarta menyerahkan wilayah pelabuhan laut yang penting itu kepada VOC dalam sebuah traktat yang ditandatangani bersama Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff, pada 1743.

“Revolusi Industri” dan Transformasi Modern Kota Surabaya

Di bawah VOC, dan kemudian pemerintah kolonial Hindia-Belanda, Surabaya memasuki lembaran sejarah baru yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kestabilan politik jangka panjang di bawah kekuasaan baru menjadi dasar transformasi modern Kota Surabaya menjadi kota industri dan perdagangan terkemuka di Hindia-Belanda sampai awal abad ke-20. Seiring tegaknya kontrol kolonial atas wilayah itu, Surabaya berkembang dari wilayah yang sebelumnya penuh gejolak menjadi sebuah wilayah yang stabil dan siap melakukan “revolusi industrinya”.

Ada tiga faktor penting berperan besar dalam proses ini. *Pertama* adalah pengembangan instalasi militer dan pangkalan angkatan laut serta pembangunan bengkel artileri di Surabaya pada 1802 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels sebagai langkah menghadapi pasukan Inggris di Jawa. Namun, dibanding keberhasilannya dalam mempertahankan diri dari serangan militer Inggris, bengkel konstruksi dan galangan kapal lebih memberi sumbangan besar terhadap tahap awal industrialisasi kota Surabaya. Momentumnya terjadi pada 1837 saat Gubernur Jenderal De Eerens melanjutkan rencana Daendels yang terhenti akibat pendudukan Inggris di Hindia-Belanda. Sebuah komisi dibentuk dan mulai bekerja pada 1837 dengan agenda pembentukan kompleks maritim di bagian kanan Kalimas sebagai pusat pusat perkembangan industri galangan kapal dan persenjataan berat yang dibangun melalui mesin-mesin bertenaga uap dan batubara. Dalam catatan perjalanan seorang jurnalis awal di Hindia-Belanda, W.R. Van Hoevel, gambaran perkembangan pembangunan kompleks maritim tersebut menurutnya “hampir sama dengan yang dibangun di Amsterdam, tetapi di sini jauh lebih besar dan kolosal” (Faber: 135). Perkembangan industri galangan kapal dan persenjataan di sekitar pelabuhan ini membentuk satu kompleks

industri awal di Kota Surabaya yang terus berkembang sampai abad ke-20 sebelum kemudian pemerintah mengembangkan kompleks industri baru di Ngagel karena wilayah sekitar pelabuhan tidak lagi mampu menampung perkembangan industri baru.

Kedua, dan ini terus menjadi faktor penting sampai awal abad ke-20, adalah berkembangnya eksploitasi tanaman keras dan produksi gula di sekitar Surabaya dan perdalaman Jawa Timur sejak ditetapkannya kebijakan Tanam Paksa di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch pada 1830 dan mencapai puncaknya pada era liberal yang membuka Hindia-Belanda bagi modal swasta kolonial. Perubahan wilayah perdalaman menjadi tempat produksi tanaman keras dan eksploitasi gula untuk ekspor ke pasar dunia menjadi pijakan penting industrialisasi di kota tersebut. Catatan H. Van Kol, yang datang mengunjungi Kota Surabaya pada awal abad ke-20 menuturkan bahwa di sekitar keresidenan Surabaya, Pasuruan, Besuki dan Jombang, terdapat sekitar 37 pabrik gula yang menyewa tanah penduduk dan 25 persil lahan untuk tanaman kopi. Di sekitar Pasuruan dan Besuki saja, jumlah total tanah penduduk yang digunakan sebagai ladang tebu dan perkebunan mencapai 22.445 bouw atau 22 persen dari seluruh perkebunan tebu yang ada di Jawa (Van Kol, 1903).

Pabrik-pabrik gula di sekitar Surabaya dan wilayah perdalaman seperti Pasuruan, Kediri, Jombang, dan Mojokerto, membutuhkan perbaikan dan penggantian perangkat mesin produksi. Kebutuhan ini awalnya dipasok langsung dari Eropa. Namun, dengan pertimbangan efisiensi, kebutuhan ini mulai dipasok secara lokal dengan berkembangnya pabrik mesin di kota Surabaya. Semakin banyak pabrik gula dan usaha perkebunan berkembang, semakin banyak pula kebutuhan untuk perawatan mesin dan perbaikannya dilakukan, dan semakin berkembang pula industri metal dan permesinan di kota tersebut. Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi gerbang ekspor-impor dari dan menuju pasar Eropa, berkembang menjadi semakin penting sebagai titik penghubung antara Kota Surabaya dengan kota-kota besar lainnya di dunia seperti Amsterdam, New York, London, Singapura, Jepang, Tiongkok dan Australia. Sampai awal abad ke-20, perkembangan industri, khususnya terkait dengan produksi mesin, telah menampilkan sebuah struktur industri yang sama sekali tidak menggambarkannya sebagai wilayah koloni Eropa di dunia ketiga seperti ditampilkannya dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Komposisi Kegiatan Industri Manufaktur
sesui jumlah pabrik dan pekerja di Surabaya, 1921

Sektor Industri	Jumlah Pabrik	Pekerja	Rumahan < 5 Pekerja
Makanan, Minuman dan Tembakau	44	1.495	20
Pabrik roti	11	127	6
Makanan Lainnya	5	419 (-)	5
Es dan Soft-drink	22	640	5
Minuman Alkohol	3	171 (+)	2
Rokok dan Sigar	3	138 (+)	2
Tekstil, Pakaian dan Sepatu	19	783 (+)	14
Tenun, batik	2	98 (+)	7
Penjahit	12	-	2
Penyamakan Kulit	5	685	5
Kayu	57	965 (+)	65
Furniture	42	665 (+)	57
Pemotongan kayu	8	300	1
Perkapalan	7	-	7
Kertas dan Percetakan	18	1.172 (+)	11
Kimia & Farmasi	35	243 (+)	5
Sabun	12	94 (+)	1
Lainnya	23	149 (+)	4
Bahan Bangunan	51	2.136	66
Bata dan Keramik	41	1.962	26 (?)
Gamping	5	158 (-)	37 (?)
Lainnya	5	16 (+)	3
Mesin dan Baja	69	11.460	47
Bengkel Mesin	23	10.326	-
Pandai besi dan peleburan baja	18	395	33
Bengkel perbaikan kendaraan	15	682	9
Perhiasan	13	57 (+)	5
Total	293	18.254	228

Sumber: Howard Dick (2003). *Surabaya. City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Singapore, National University of Singapore. Halaman 268.

Ketiga adalah perkembangan industri kereta api di Hindia Belanda yang menempatkan Surabaya sebagai pusat kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kereta api milik jawatan kereta api negara (*Staatspoorwagen*) di Kota Surabaya memasuki akhir abad ke-19. Pembangunan jalur kereta api Surabaya-Pasuruan-Malang adalah pekerjaan pertama perusahaan kereta api negara tersebut di Hindia. Sebelumnya, pembangunan-pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah telah diupayakan perusahaan swasta seperti *Nederlandsch Indisch Spoorwegen* (NIS). Namun, problem keuangan yang menimpa perusahaan itu menyebabkan serangkaian agenda pengembangan jalur kereta api di Jawa mengalami hambatan. Berdasarkan *Staatsblad* 141 tahun 1875 pemerintah pun membentuk jawatan keretanya yang memelopori pembangunan jalur-jalur baru di Hindia.

Gambaran menarik dari perkembangan kapitalisme kolonial abad ke-19 menampilkan bukan saja peralihan ekonomi kolonial dari sistem ekonomi dengan negara sebagai kekuatan utama, menjadi sebuah praktik ekonomi yang semakin banyak dari orang-orang Belanda, tetapi juga perkembangan kekuatan modal swasta yang berpengaruh dalam pembentukan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya saat itu menggantikan peran negara. Praktik ini menjadi pola umum yang muncul dalam proses perkembangan industrialisasi di kota Surabaya. Kisah sosok "raja baja" Frans Jacob Hubert Bayer yang menjadi pionir industri swasta di Surabaya menjadi ilustrasi menarik tentang kiprah warga partikelir dalam perkembangan yang terjadi di kota pada pertengahan abad ke-19. Sebelum mengembangkan pabriknya sendiri, Bayer adalah pegawai pemerintah yang

mengawasi pekerjaan di bengkel konstruksi artileri di dalam benteng tempat hunian warga Eropa tinggal. Pada September 1841, ia mengajukan diri untuk berhenti dan membangun sendiri bengkel industri dengan nama *Stoomfabriek* yang kemudian berganti menjadi *Phoenix*. Menyadari arti strategis pabrik yang didirikan Bayer, pada 1844 pemerintah membeli pabrik itu dengan nilai f. 100.000 uang perak. Bayer sendiri tetap menjadi pemimpin dalam perusahaan itu. Namun, dengan modal baru yang dimilikinya, Bayer membangun lagi pabrik baru yang menghasilkan produk baja bernama *De Volharding*. Pabrik ini terus bertahan sampai awal abad ke-20. Agen-agen perusahaan besar seperti *Handelsvereeniging Amsterdam* (HvA); *Nederlandsch Handelsmaatschappij*, *De Javasche Bank* membuka kantor-kantor perwakilan mereka di Kota Surabaya (Faber, 1931).

Di luar pengusaha Belanda, sejumlah warga Eropa lain turut serta dalam perkembangan ekonomi baru di koloni seperti ditunjukkan melalui pembentukan perusahaan Firma *Fraser Eaton & Co*, perusahaan milik orang Inggris di kota itu yang secara khusus menangani impor barang-barang dari Eropa, seperti katun dan produk manufaktur, selain juga ekspor produk-produk lokal seperti gula, kopi, karet, minyak sitrun, dan kina ke pasaran Eropa. Kemudian perusahaan milik orang Armenia, *Joakim & Co*. dan *Thomas & Co.*, yang menjadi dasar perkembangan kelompok orang-orang Armenia di kota Surabaya. Pada 1851, para pengusaha itu membentuk *Soerabaiasche Handelsvereeniging* (Perkumpulan Dagang Surabaya) yang kemudian berubah nama menjadi *Kamer van Koophandel en Nijverheid* (Kamar Dagang dan Industri) pada 1863 sebagai upaya melindungi kepentingan-kepentingan usaha mereka. Di sektor jasa, perkembangan yang terjadi ditunjukkan melalui pembentukan firma hukum *Anemaet* milik Jhr. C.G. van Haeften, J.C.A. van Haeften dan A.J.W. van Delden (Faber, 1931). Dalam kaitan ini, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya tampil sebagai kekuatan utama dalam arus perubahan yang terjadi di Kota Surabaya dan menampilkan wajah kosmopolitan Kota Surabaya pada paruh kedua abad ke-19. Catatan statistik tentang penduduk kota memberikan gambaran sejauh mana sifat kosmopolitan kota itu.³

³ Di luar warga Belanda yang menjadi kelompok besar dalam perkembangan populasi warga

Kota Kolonial dan Kelas Menengahnya

Sampai awal abad ke-20, industri dan perdagangan telah menjadi daya dorong utama yang mengubah posisi Surabaya sebagai salah satu wilayah pinggiran di dalam struktur kekuasaan tradisional menjadi pusat orientasi baru di Hindia-Belanda. Capaian perkembangannya dalam waktu kurang dari satu abad bahkan melampaui kota Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial saat itu. Gambaran tentang sejaun mana Surabaya melampaui kota Batavia dalam hal kemajuan ekonomi dan karakter budaya penduduk yang tinggal di dalamnya diuraikan dengan menarik oleh Moses van Geuns, redaktur *Soerabajasch Handelsblad*, surat kabar berhaluan liberal yang terbit di kota itu. Van Geuns menyatakan apabila di Batavia orang segera “mendapatkan formalitas dan kekakuan para birokrat” dan “kesantunan serta kebersihan ala negeri induk”, di Surabaya yang muncul adalah “kebebasan dan segala sesuatu yang berjalan di luar aturan” mewakili “watak kosmopolitan dan pikiran yang terbuka” (Van Geuns. “Batavia Nouvelles” dalam *Soerabaja Handelsblad*, 26 April 1907).

Ciri tentang sikap warga kota yang merdeka dan bebas dari pengaruh negara dalam kaitan ini bukan saja terbatas pada kalangan warga partikelir Eropa, tetapi juga di kalangan orang-orang Indonesia yang tinggal di kota itu. Uraian Parada Harahap dalam perjalanan jurnalistik kelilingnya pada 1939 menyebutkan bahwa ‘sikap ke-*ambtenaar*-an’ tidak terlihat di antara penduduk pribumi di dalam lingkungan kota Surabaya. Menurutnya “pengaruh dagang” adalah salah satu faktor yang menjadi dasar keluasan dan kemerdekaan pribadi *arek Suroboyo* (Harahap, 1952: 183. dikutip dari Basundoro, 2011). Gambaran ini yang menjadi dasar bagi William Frederick (1989) merumuskan konsepsi *priyayi baru* yang membentuk sosok

Eropa, , beberapa warga asing lainnya yang tinggal di Surabaya ditunjukkan melalui keberadaan warga Jerman yang menjadi populasi Eropa terbesar kedua (844 jiwa) setelah orang-orang Belanda, disusul Armenia (388 jiwa), Inggris (383 jiwa), Prancis (85 jiwa), Swiss (67 jiwa) dan beberapa warga Eropa lainnya. Di luar kategori Eropa, warga asing lainnya sebagai penghuni kota dengan jumlah cukup signifikan adalah Jepang (720 jiwa), Amerika Serikat (31 jiwa) dan Filipina (26 jiwa). Bersama mayoritas penduduk pribumi (265.872 jiwa); Tionghoa (38.797 jiwa); Arab dan Timur Asing lainnya (5.682 jiwa) (Von Faber, 1936).

sosial baru dalam kepemimpinan revolusi Indonesia di Kota Surabaya dengan karakter penduduk yang 'berkeinginan kuat, suka merasa bebas dari kewajiban sosial dan kewajiban lainnya,' dan 'secara samar bersifat "kelas menengah" dalam ideal-ideal mereka' (8).

Apabila para penulis Belanda dan para peneliti tentang sejarah kota itu telah menggambarkan satu karakter khusus yang mewarnai karakter penduduk kota yang berjarak terhadap aparat birokrasi kolonial di pusat dan daerah, atau disebut para *ambtenaar*, maka landasan perkembangannya terdapat pada proses sejarah pembentukan kelompok sosial baru yang terjadi di lingkungan Kota Surabaya sejak pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Kemajuan ekonomi kota dan proses industrialisasi telah menjadi basis kemunculan lapisan sosial baru di kota kolonial dari penduduk kalangan Eropa yang "merasa terlalu tinggi untuk berhubungan dengan lapisan bawah penduduk, tetapi juga bukan industrialis, pedagang besar atau pegawai pemerintah." Mereka adalah pengacara, dokter, akuntan, pedagang, jurnalis, agen asuransi, guru, seniman, dan profesi modern lainnya, termasuk juga pensiunan pegawai yang memutuskan untuk menetap lebih lama di koloni setelah menyelesaikan tugas mereka.

Kelompok ini seringkali disebut atau menyebut diri sebagai "*orang particulier sadja*" yang di kemudian hari menjadi inti kekuatan perubahan yang ada di lingkungan perkotaan (Faber 1931:61). Penggunaan istilah *de particuliere sadja* pada awalnya secara sederhana mengacu pada sosok orang-orang Eropa, Bumiputera, Tionghoa, Arab, dan lainnya yang memiliki kedudukan dan pekerjaan di luar birokrasi pemerintahan (Faber, 1931). Namun, dalam perkembangannya kemudian, konsepsi itu meluas menjadi sebuah citra ideal tentang kelas menengah di kota-kota kolonial yang memiliki selera estetis, budaya, dan pandangan serta sikap politik yang lebih bebas dari pengaruh kekuasaan negara dan memiliki keleluasaan menanggapi masalah yang dibanding para pejabat kolonial yang terikat pada struktur birokrasi dan kepatuhan terhadap atasan.⁴ Dalam

⁴ Seperti yang dilakukan Utsa Ray dalam menganalisis perkembangan kelas menengah dan kaitannya dengan budaya kuliner di kota kolonial India, pengertian konsepsi kelas menengah dalam uraian ini mengacu pada konsepsi kelas menengah seperti dikemukakan Pierre Bourdieu yang melihat

kaitan ini penggunaan istilah *de particuliere sadja* atau warga partikelir seringkali dipertentangkan dengan golongan *ambtenaar* mewakili mereka yang bekerja di dalam birokrasi kolonial dengan patronase politiknya terhadap warga di koloni.

Lapisan menengah perkotaan ini bukan saja datang ke Hindia dengan tujuan mencari penghidupan seiring pertumbuhan kemajuan ekonomi di Kota Surabaya, tetapi juga membawa kebudayaan negeri induk yang berkembang di tempat mereka yang baru. Wujudnya bisa dilihat melalui pembentukan klub-klub dan kafe (*Societeit* atau *Soos*), gedung pertunjukkan dan kegiatan seni, asosiasi-asosiasi dan utamanya media cetak yang mewakili konsepsi dan pandangan ideologis warga Eropa partikelir di Surabaya terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat saat itu. Klub menjadi institusi penting lainnya tempat mereka menghabiskan waktu dalam pembicaraan-pembicaraan panjang sore sampai malam hari adalah *soos* atau kafe, membahas situasi paling mutakhir di koloni, perkembangan dunia sastra dan kemajuan-kemajuan di dunia luar di Eropa. Ini adalah "ruang publik" yang membentuk inti masyarakat sipil Eropa di koloni dan melembagakan wacana-wacana kepentingan umum dari individu-individu yang setara di luar dominasi negara (Habermas, 1996: 367).

Klub yang paling awal hadir di kota itu adalah *Concordia* yang berdiri pada 1843 yang awalnya menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi para perwira yang bertugas di kota tersebut, termasuk para pejabat pemerintah kolonial. Studi Peter Clark (2000) tentang klub dan perkembangan sosial politik masyarakat Inggris abad ke-17 memberikan gambaran menarik tentang posisi klub yang menjadi wadah kelompok-kelompok sukarela di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, klub-klub itu menjelma sebagai suatu lembaga sosial yang "menyumbangkan integrasi politik dan budaya" warga seiring proses industrialisasi yang

pengelompokkan kelas ini bukan sekedar pada akumulasi kapital ekonomi, tetapi juga pada 'modal sosial dan budaya' yang membentuk selera, konsepsi budaya dan pandangan politik di antara kelompok ini. Lihat Utsa Ray. *Culinary Culture in Colonial India. A Cosmopolitan Platter and the Middle-Class*. Cambridge University Press, Delhi. 2015. Bandingkan juga konsepsi ini dalam ulasan Pierre Bourdieu. *Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge University Press, Massachusetts. 1984. Hal. 101-112.

menjadi kekuatan utama pembentukan kota-kota modern di Inggris sepanjang periode kajiannya (Clark: 471).

Dalam lingkungan pengalaman kontemporer kota Surabaya, sebuah kebudayaan baru berkembang di lingkungan kota itu menyerupai kehidupan di negeri induk. Pusat orientasi kota adalah gedung teater *Schouwbourg* dengan berbagai pertunjukan kesenian kontemporer dunia, termasuk pertunjukkan *Waltzraum* terbaru dari Wina, yang menjadikan gambaran kehidupan lingkungan perkotaan kolonial Surabaya sebagai "Mekahnya warga Eropa" dan sekaligus menjadi harapan bagi warga Eropa lainnya di koloni untuk ditempatkan di kota itu dalam tugas mereka di Hindia (Elout, 1930).

Dalam lingkup perkembangan tersebut klub dan budaya asosiasi menjadi bagian dari perkembangan kelas menengah perkotaan di Surabaya saat itu. Gambaran tentang profil warga partikelir dan kesadaran tentang peran mereka dalam masyarakat diunjukkan melalui sosok Adriaan Paets tot Gonsaijen, seorang pengacara sukses dan duduk dalam beberapa jabatan penting di Surabaya seperti menjadi ketua *Algemeene Syndicaat van Suikerfabrieken* (Sindikat Pabrik Gula) dan Kamar Dagang di Surabaya. Kiprah dan perhatian Gansoijen dalam memajukan kepentingan warga Kota Surabaya membuat Paets menjadi salah seorang kandidat yang diajukan dari kalangan partikelir untuk duduk sebagai wakil warga kota di Dewan Kota Surabaya (*Gemeenteraad Soerabaja*) yang dibentuk pada 1906. Aktivitas politik dan kedudukannya dalam beberapa organisasi menjadi jembatan kedekatan Paets Gansoyen dengan kelompok bisnis di Surabaya. Hal ini ditunjukkannya dalam penggalangan dana di antara pengusaha untuk pemberantasan wabah pes di Surabaya yang menyebabkan Paets tot Gansoyen mendapat anugerah medali kehormatan *Orde van Oranje Nassau* dari pemerintah Kerajaan Belanda.

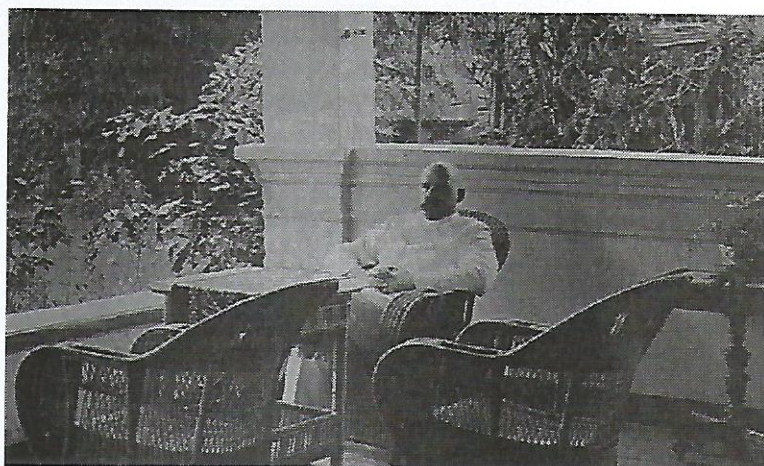
Kiprah Gansoijen bisa dilihat dalam perannya membentuk "Perkumpulan Untuk Memajukan Kepentingan Warga Kota Surabaya" (*De Vereeniging tot Bevordering van de Belangen van Soerabaja*) yang merupakan sebuah perkumpulan warga kota mewakili kepentingan mereka terhadap persoalan-persoalan di dalam kota. Statuta organisasi itu menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan "mewakili kepentingan warga Kota Surabaya

melalui cara-cara sesuai aturan hukum yang berlaku." Segera setelah pembentukannya, agenda pertama yang dilakukan adalah mengkampanyekan perbaikan sanitasi kota yang mengatur pembuangan limbah, kotoran manusia, sampah dan genangan air di musim hujan yang dianggap sebagai penyebab utama menyebarnya wabah penyakit kolera di kota itu (*Soerabajasch Handelsblad*, 1 Juli 1897 & 7 Agustus 1897)

Selain Gansoijen, sosok-sosok penting di balik perkumpulan itu adalah Fabius yang menjadi ketuanya. Sementara jabatan bendahara dipegang oleh J.H. Scholten yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Surabaya, dan sekretarisnya W.F. Schimmel, redaktur *Nieuwe Soerabaja Courant*. Di sini kita mendapatkan gambaran menarik tentang sikap dan imajinasi politik kelas menengah perkotaan yang senantiasa mengambil jarak dari kekuasaan negara dan berpandangan kritis terhadap pemerintah dalam upaya mereka memajukan kepentingan-kepentingannya sebagai warga kota kolonial Surabaya pada saat itu. Paets tot Gonsaijen dalam kaitan ini gambaran menarik tentang sosok orang *particulier sadja* yang mewakili saling kaitan antara posisi sosial kelas menengah perkotaan dan aktivitas mereka di ruang publik.⁵

Kemunculan kelas menengah perkotaan di lingkungan Kota Surabaya pada akhirnya menjadi landasan kemunculan budaya politik liberal dan tradisi kritik terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang berlebih di dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini pula yang menjadikan Surabaya menjadi kiblat kemajuan

⁵ Adriaan Paettot Gansoyen meraih gelar doktor bidang hukum di Universitas Rijks pada 1891 sebelum kemudian berangkat ke Hindia-Belanda dan mendirikan kantor pengacara yang sukses di Surabaya. Sosok pribadi dan riwayat hidupnya sendiri cukup kontroversial. Sebagai anggota dewan, ia terkenal dengan posisinya yang keras dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, kiprahnya dalam memelopori pembentukan Komite Pemberantasan Pes di Surabaya menyebabkan pemerintah memberinya medali kehormatan *Orde van Oranje Nassau* dari Kerajaan Belanda pada 1908. Sosoknya pribadinya sendiri dikenal sebagai seorang pendiam dengan "watak aristokrat" dan karakter impulsif yang menjadikannya sering berbenturan dengan rekan-rekan sesama anggota dewan. Ia mengundurkan diri pada 1913 dari kedudukan sebagai anggota dewan karena sikapnya yang keras terhadap skandal korupsi di lembaga tersebut telah menjauhkannya dari rekan-rekannya, meski tuduhan yang dilontarkannya dianggap keliru.



Gambar 1.

Adriaan Paets tot Gansoyen di beranda rumahnya di Kampung Sawahan, Surabaya. Sumber: Dok-KITLV.

dan perkembangan intelektual di Hindia-Belanda. Tradisi ini pula yang dianggap menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Surabaya yang memberi ruang lebih besar bagi kaum perempuan di ruang publik. Di kafe-kafe, klub dan tempat hiburan lainnya di kota itu, kehadiran perempuan Eropa cukup menyolok yang memberi suasana berbeda dengan kota-kota kolonial lainnya di Hindia saat itu.

Penulis kolom budaya *Bataviasch Nieuwsblad*, menguraikan dalam catatan *causerien*-nya bahwa "Surabaya adalah kota dengan keistimewaan berbeda bagi kalangan perempuan dibanding kota lain, termasuk Batavia." Di Batavia, kecuali saat pertunjukan musik sore, kaum perempuan tidak terlihat duduk di dalam klub *Harmonie* atau *Concordia*. Suasananya berbeda ditunjukkan di Klub Simpang yang tidak pernah sepi dengan kehadiran perempuan sejak sore sampai malam hari. Setelah menonton pertunjukan atau konser musik, mereka tidak mampir ke restoran *Grim* atau *Hellendorn*, tetapi lebih ke Simpang untuk menikmati minuman segar, duduk bersama dengan kaum pria di taman. "Saya melihatnya sebagai tanda zaman yang menyenangkan. Paling tidak mencegah suara berisik kaum lelaki di dalam klub ini," tulis artikel tersebut (*Soerabaja Causerien*).

Politik Air Bersih dan Kesadaran Politik Kewargaan Warga Kota

Meski golongan kelas menengah perkotaan telah muncul menjadi kekuatan sosial dan politik penting di lingkungan kota, tetapi sistem birokrasi pemerintahan sentralistik yang mengabaikan partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan kota mereka menjadi ciri utama kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda sampai awal abad ke-20. Landasannya didasarkan pada konstitusi negara kolonial yang tercantum dalam *Regeering Reglement 1854* (RR1854) yang memberikan Gubernur Jenderal kekuasaan besar menentukan berbagai urusan pemerintahan dan setiap pejabat kolonial di tingkat pusat sampai daerah wajib menjalankan perintah-perintah Gubernur Jenderal. Gambaran ini yang kemudian membentuk sikap umum di kalangan para pejabat kolonial yang senantiasa menekankan peran penting birokrasi pemerintah kolonial dalam mengelola koloni. Pandangan ini menekankan bahwa situasi di koloni tidak pernah dapat dijalankan dalam model politik negeri induk yang memberikan hak-hak demokratis bagi warga mereka, baik dari kalangan warga partikelir Eropa maupun penduduk Bumiputera, untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan (*medezeggenschap*) yang otonom di tingkat lokal (Wignjosubroto, 2005)

Ilustrasi tentang sikap ini ditunjukkan melalui sebuah surat yang ditulis Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge kepada Menteri

Koloni di Belanda pada 1876 memberi ilustrasi tentang pandangan yang berlaku. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan apakah situasi di koloni sudah cukup matang untuk digulirkannya sebuah pemerintahan lokal yang otonom, Lansberge menjawab bahwa "Keperluan berpartisipasi dalam kehidupan publik di sini belum terasa." Lebih lanjut ia menyatakan bahwa di kalangan penduduk Pribumi ia tidak melihat adanya keinginan itu "karena masyarakatnya memang belum berkembang." Pandangan yang sama juga berlaku terhadap penduduk warga partikelir Eropa. Lansberge mengatakan bahwa warga Eropa di koloni tidak terlalu perduli terhadap pembentukan pemerintahan di tingkat lokal "karena mereka bukan warga di negeri ini." Mereka datang ke Hindia "lebih karena pekerjaan dalam dinas pemerintah" dan "mencari kehidupan seiring perkembangan industri dan perdagangan" (*Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap*, 1968: 36).

Pernyataan Lansberge dalam suratnya bagaimanapun hanya mewakili satu sisi pandangan dari kalangan pejabat tinggi kolonial Hindia-Belanda terhadap situasi di koloni. Sebuah peristiwa yang terjadi di Kota Surabaya memberi petunjuk tentang bagaimana pandangan Lansberger sepihak saja. Titik tolaknya dimulai dengan kekhawatiran warga Eropa di dalam lingkungan kota terhadap wabah kolera yang berulang-ulang melanda Surabaya yang menimbulkan korban dari kalangan warga Eropa. Sebagai tanggapan terhadap persoalan itu, warga kota membuat sebuah petisi agar pemerintah di pusat turun tangan untuk membangun infrastruktur air bersih sebagai cara mengatasi wabah kolera. Namun, kelambanan birokrasi pemerintah kolonial dalam menanggapi ini menimbulkan sentimen yang membangkitkan antipati terhadap cara pemerintah kolonial di pusat menangani masalah-masalah yang dihadapi warga kota. Gambarnya ditunjukkan dalam sebuah editorial yang terbit di *Soerabajasch Handelsblad* mengomentari sifat tidak tanggap pemerintah pusat sebagai berikut.

Wabah kolera dan demam sporadis yang berujung pada kematian menjadi gambaran hari ini. Usulan pembangunan fasilitas air minum, seperti tertuang dalam rencana Birnie dan Eijdmann untuk memberikan warga kota air bersih di rumah mereka tetap tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat...

Satu-satunya penyelesaian yang paling mungkin adalah pembentukan pemerintah kota dan otonomi yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal. Sentralisasi pemerintahan yang berlebihan, yang kita alami sekarang ini, tidak bisa memberi kebaikan apapun. Pengalaman telah menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan atas dasar pengalaman itu kita bisa menyimpulkan bahwa akhir dari sentralisasi pemerintahan adalah revolusi. ("De Week", *Soerabajasch Handelsblad*. 16 Januari 1897).

Sikap abai pemerintah kolonial menyebabkan warga Kota Surabaya menggalang aksi protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pada Maret 1897 sekitar 300 warga kota menandatangani petisi kepada Gubernur Jenderal memohon pembangunan fasilitas air bersih sekaligus meminta kejelasan apakah pemerintah pusat akan menindaklanjuti permintaan mereka sebelumnya (*Algemeen Handelsblad*, 2 Maret 1897). Namun, petisi itu pun sekali lagi diabaikan. Pada akhir April 1897, atas inisiatif W.F. Schimmel, redaktur surat kabar *DeSoerabaja Courant*, dan E. Fabius, pensiunan perwira angkatan darat yang juga pemegang saham surat kabar tersebut, mengadakan serangkaian pertemuan bersama warga kota gedung teater pusat kota (*Schoonwbourg*), untuk menyusun sebuah petisi yang kali ini dikirim langsung ke Ratu di negeri Belanda. "Kita tahu bahwa Residen telah menyampaikan persoalan ini untuk segera diputuskan Gubernur Jenderal," tulis seorang warga dalam surat pembaca di *Soerabajasch Handelsblad*. "Namun, kita juga tahu Gubernur Jenderal bukan orang yang mampu melakukan perubahan apapun."⁶ Untuk membangkitkan perhatian publik, rancangan petisi terlebih dahulu diterbitkan di surat kabar yang terbit di Surabaya saat itu sebelum kemudian dikirim ke Ratu Belanda.

Kepada Yang Mulia Ratu
Pemerintah Belanda di Den Haag,
Dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ratu
dari warga kota Surabaya,

bahwa dalam waktu yang cukup lama kami telah menunggu dengan sia-sia langkah Pemerintah menyediakan layanan air bersih bagi warga Surabaya;

bahwa permintaan-permintaan yang kami tujukan kepada Gubernur Jenderal dan

⁶"Drinkwatervoorziening voor Soerbaja," *De Locomotief*, 18/03/1897.

Menteri Kolonial dari rangkaian diskusi publik yang kami lakukan terkait pembangunan layanan air bersih tidak mendapatkan tanggapan apapun;

bahwa wabah kolera yang mengerikan terus-menerus mengancam Kota Surabaya sejak tahun lalu dan menimbulkan kebutuhan mendesak penyediaan air bersih untuk mengatasi wabah yang terus datang;

bahwa pemerintah sama sekali tidak bersedia atau hanya mau memberikan dukungan kepada konsesi pembangunan layanan air bersih dengan biaya serendah mungkin;

bahwa kami, warga kota dan keluarga yang terancam kehidupannya, sangat memohon kesediaan Yang Mulia untuk memberikan dukungannya agar Kota Surabaya segera memiliki fasilitas layanan air bersih.

("Watervoorziening Soerabaja", *Soerabajasch Handelsblad*, 1 Mei 1897)

Di negeri Belanda petisi warga Kota Surabaya mendapat tanggapan cepat. Sebuah komisi segera dibentuk dibawah pimpinan H.P.N Helbertsma yang diharapkan bekerja cepat mempelajari usulan terkait rencana pembangunan proyek air bersih bagi warga kota Surabaya.⁷ Petisi itu pada akhirnya menjadi tampanan bagi Gubernur Jenderal C.H.A van der Wijck yang baru setahun menduduki posisinya. Pemerintah pusat di Batavia hanya bisa membela diri dengan mengatakan bahwa petisi warga Kota Surabaya sesungguhnya hanya mewakili segelintir penduduk Eropa di kota itu. Argumen itu dilengkapi dengan pandangan yang senantiasa menjadi posisi pemerintah kolonial dalam menghadapi kritisisme warga Eropa di koloni bahwa "tuntutan tersebut tidak mewakili kepentingan penduduk bumiputera yang merupakan mayoritas penduduk di kota Surabaya".

Pemerintah juga menyatakan bahwa yang lebih diperlukan di Surabaya adalah memperbaiki saluran got dan limbah yang menjadi penyebab tercemarnya sumur-sumur

⁷Di parlemen Belanda, rencana pelaksanaan proyek tersebut sempat memunculkan kritik tajam dari wakil parlemen H. Van Kol tentang distribusi pasokan yang tidak seimbang antara warga Eropa yang mencapai 150 liter perhari, sementara penduduk pribumi yang tinggal di kota itu hanya mendapat 50 liter pasokan dan penduduk desa sekitar mata air hanya mendapat 5 liter pasokan setiap harinya (Lihat *Soerabajasch Handelsblad*, 18 Mei 1900)

warga di Surabaya. Namun, bantahan terhadap posisi pemerintah muncul di surat kabar *Soerabajasch Handelsblads*. Baertelds menulis bahwa persoalannya justru terletak pada sikap bimbang Gubernur Jenderal dalam memutuskan apakah pelaksanaan proyek pengadaan air bersih di Surabaya akan dilakukan pihak swasta atau pemerintah. Akhir pertentangan tersebut menunjukkan kemenangan warga kota dalam pertentangan mereka berhadapan dengan kekuasaan sentralistik birokrasi kolonial. Ada waktu sekitar empat tahun setelah petisi tersebut pekerjaan pembangunan proyek air bersih bagi warga kota selesai pada November 1903. Dalam sambutan perayaan peresmian fasilitas tersebut, asisten-residen menyatakan bahwa keberadaan layanan air bersih menjadi "penyelamat" Kota Surabaya dan menyampaikan pesan selamat melalui telegram dari Ratu dan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom kepada warga Surabaya atas dimulainya layanan air bersih di kota mereka (*Algemeen Handelsblad*, 04 November 1903).

Dewan Kota dan Otonomi Politik Warga

Peristiwa yang terjadi terkait aksi warga kota menggalang petisi melawan pemerintah pusat menandai sebuah perkembangan politik baru di koloni yang tidak dapat lagi ditunda oleh para pembuat kebijakan di pusat dan negeri induk tentang bagaimana cara mengatur kehidupan politik di koloni. Apabila pada pertengahan abad tersebut ide tentang politik kewargaan dan bagaimana pembentukan pemerintahan kota yang otonom menjadi dasar pembicaraan warga Eropa di koloni, memasuki akhir abad ke-19 tuntutan terhadap kebutuhan sistem politik yang dapat menampung aspirasi warga semakin mendapatkan bentuk kongkritnya. Di bagian ini akan diuraikan pula wujud ekspresi lainnya yang mengukuhkan praktik kewargaan modern melalui kehadiran dewan kota sebagai wujud kelembagaan prinsip kewargaan tersebut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu tema sentral yang membentuk sifat hubungan ambivalen antara aparat negara kolonial dan warga Eropa di koloni berpusat pada desakan tentang pelaksanaan otonomi kekuasaan di daerah, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi konsentrasi pemukiman warga Eropa, di dalam sistem birokrasi kolonial yang sentralistik.

Memasuki awal abad ke-20, ketegangan dan pertentangan yang mewarnai hubungan antara warga partikelir Eropa dan kalangan

ambtenaar yang mewakili birokrasi kolonial mendapatkan jalan keluarnya melalui reformasi politik kolonial dengan lahirnya Undang-Undang Desentralisasi 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*) dan Ordonansi Dewan Lokal (*Local Raaden Ordonantie*) tahun 1905. Undang-Undang ini menjadi dasar pembentukan lembaga politik kunci di kota-kota kolonial Hindia-Belanda melalui pembentukan lembaga dewan kota (*gemeenteraad*) sebagai lembaga kolegial yang mendampingi pembentukan pemerintah kotapraja (*gemeente*), sekaligus sebagai langkah pemerintah mengakomodasi tuntutan yang lahir terkait partisipasi warga partikelir Eropa dalam urusan pemerintahan di tingkat lokal (*medezegenschap*).

Dengan memperhatikan perkembangan dinamika politik yang terjadi sebelumnya, pembentukan pemerintahan kotapraja dan dewan Kota Surabaya pada 1906 dibanding sekedar sebuah produk kebijakan yang datang dari atas seperti disebut dalam ulasan Howard Dick (2003) dalam kajiannya tentang perkembangan kota Surabaya, perkembangan itu juga sesungguhnya melibatkan sebuah pertentangan panjang antara warga dan negara dalam kasus Surabaya dan lebih mewakili sebuah kebijakan yang datang terlambat dari harapan-harapan yang telah berkembang sebelumnya tentang sebuah pemerintahan yang otonom di tingkat lokal. Pembentukan dewan kota lahir dalam konteks perkembangan ketika sentimen antibirokrasi dan sentralisme pemerintah pusat dalam mengurus koloni telah menjadi tema umum yang dibicarakan warga kota. Uraian selanjutnya dalam bagian ini akan menggambarkan bagaimana perkembangan dewan kota sebagai sarana mewujudkan partisipasi politik warga di dalam konsepsi kewargaan modern.

Sejak 1 April 1906, Dewan Kota Surabaya secara resmi mulai terbentuk dan menjalankan tugasnya di lingkungan kota Surabaya. Sesuai dengan mandat yang terdapat dalam *Staatsblad No. 149/1906*, pembentukan *Gemeente* (Pemerintah Kotapraja) berjalan seiring dengan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) yang menjadi lembaga yang menetapkan keputusan-keputusan penting menjadi program kerja pemerintah kotapraja. Seorang walikota diangkat untuk memimpin pelaksanaan fungsi eksekutif di dalam pemerintah kotapraja dan sekaligus menjadi pemimpin dewan kota yang menetapkan secara kolegial bersama anggota

dewan lain keputusan-keputusan penting program pemerintah kota.

Di dalam ketetapan tersebut, disebutkan juga cakupan wewenang lembaga pemerintah kota yang mencakup pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu lalu-lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, toilet, rumah potong hewan dan gudang pasar (*Staatsblad No. 149/1906*). Bentuk kelembagaan dan wewenang ini akan terus berkembang dalam proses perjalanan waktu sampai berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda. Dengan segala keterbatasannya, lembaga tersebut bagaimanapun telah menandai suatu langkah awal pembentukan sebuah tata kelola pemerintahan kota modern (*urban governance*) di koloni Hindia-Belanda yang melibatkan partisipasi warga kota dalam menentukan arah dan orientasi kebijakan pemerintah kota.

Gambaran yang menarik dari proses politik tersebut—dengan memperhatikan koloni sebagai wilayah yang tertutup untuk kegiatan politik yang berlaku juga bagi warga Eropa—tokoh-tokoh yang muncul mengisi kedudukan wakil warga di dalam kota datang dari sejumlah warga partikelir hasil pemilihan warga kota. Fenomena menarik yang muncul adalah dibanding mewakili sebuah ikatan dengan ideologi dan organisasi politik tertentu, sosok-sosok individu yang duduk di dewan kota mewakili orang-orang yang telah menjalani kehidupan di Hindia memasuki akhir abad ke-19 ketika industri, perusahaan ekspor-impor, perbankan, firma hukum dan penerbitan surat kabar menjamur yang sekaligus menjadi basis pertumbuhan kelompok sosial baru orang-orang Eropa di koloni. Dalam latar belakang seperti ini, wakil warga lebih mewakili kiprah sebagai sosok individu yang menjadikan idealisme pribadi masing-masing wakil menjadi pokok yang membentuk pandangan mereka tentang kota sebagai tempat yang layak huni dari sudut pandang warga Eropa. Tidak mengherankan bila isu-isu terkait kesehatan publik, sanitasi, jalan-jalan, dan pemukiman di ruang kota menjadi perhatian utama dalam pembahasan mereka.

Sepanjang tahun-tahun awal itu, para anggota dewan telah berdebat tentang genangan air di sekitar Krembangan yang menjadi pusat penyebaran penyakit tropis dan merumuskan langkah kebijakan memperbaiki sanitasi di lingkungan tersebut. Dalam sebuah mosi yang

diajukan Campbel, yang mempersalahkan kelambanan para birokrat yang membuat pekerjaan terkatung-katung dan hanya berkembang dari satu laporan ke laporan berikutnya tanpa pekerjaan bersifat teknis di lapangan. Dari sudut pandang wakil-wakil kalangan partikelir, seperti disampaikan Paets tot Gansoyen dalam salah satu pernyataannya, para birokrat di koloni tidak lain adalah “bencana” di dalam kehidupan masyarakat sipil Eropa di kota kolonial Surabaya saat itu (“*Soerabajasch Causerieen*”, BN. 7 April 1910). Mereka hanya menunda dan menjadikan kepentingan warga menjadi urusan sampingan di luar urusan pemerintah.

Di dalam konteks ini catatan perdebatan di dalam kota menampilkan wacana menarik tentang pertentangan klasik dari dekade-dekade sebelumnya antara kaum *ambtenaar* di dalam birokrasi kolonial dengan kalangan partikelir mewakili warga kota sebagai *burgerij* yang memiliki banyak tuntutan dan sadar atas hak mereka sebagai warga kota pembayar pajak. Pembicaraan-pembicaraan warga partikelir di lingkungan *soos* Kota Surabaya tentang pertentangan politik di dalam dewan memberikan perbandingan menarik terhadap apa yang terjadi di dewan dengan kisah *Antigone* melawan tirani Raja Creon dalam drama *Sophocles*. Tidak ada fraksi, kelompok, atau partai politik yang menentukan arah dan bentuk perdebatan dalam rumusan kebijakan dewan kota. Suara yang muncul lebih mewakili pandangan individu dengan pendapat masing-masing tentang apa yang mereka anggap mewakili kebaikan umum di kota mereka. Tidak ada politik kaum liberal atau juga sosial-demokrasi dan tidak ada pembagian dari masing-masing anggota dewan atas dasar perbedaan kelompok politik dan partai. Mereka ibarat ksatria abad pertengahan yang membawa misi perbaikan di dalam kehidupan publik sesuai sudut pandang pribadi masing-masing, berdebat di antara kalangan sendiri, tanpa memiliki ikatan apapun dengan praktik politik kolektif melalui partai atau perkumpulan politik lainnya (“*Politieke Don-Quichotterie*”, SH, 5 Maret 1908).

Bagaimanapun, dewan kota tidak dapat disangkal telah berkembang menjadi institusi baru dalam sistem politik kolonial yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan perkotaan Surabaya, terutama di antara komunitas Eropa yang jumlahnya bertambah dua kali lipat sepanjang dua dekade awal abad ke-20. Keberadaan dewan kota mewakili sebuah bentuk

kelembagaan yang menampung sejumlah besar perbincangan dan perdebatan dari kalangan warga Eropa yang beredar di ruang-ruang publik perkotaan kolonial seperti *soos*, kafe, gedung teater, dan termasuk media surat kabar cetak dengan para editornya berulang kali menghadapi kasus *persdelik* karena tulisan-tulisan yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban kolonial.

Warga kota pun dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam dewan, membaca argumen dan posisi masing-masing individu yang menjadi wakil mereka, dan mengikuti bagaimana arah perdebatan-perdebatan tersebut sebelum akhirnya menjadi suatu rumusan yang melatari bentuk kebijakan publik yang lahir. Informasi ini tersedia melalui buletin rutin yang dikeluarkan dewan kota, dan juga notulen persidangan dewan yang secara rutin muncul di surat kabar kolonial. Keseluruhannya menjadi sumber informasi menarik bagi para sejarawan untuk melihat awal perkembangan praktik demokrasi di tingkat lokal pada masa awal perkembangannya dalam era kolonial di Indonesia saat itu.⁸

Suatu pertentangan menarik yang muncul mewakili sebuah konflik dan ketegangan lama antara kalangan *ambtenaar* dan warga partikelir muncul pada Juli 1914, terkait usulan dari Residen Surabaya, A. Van Aalst untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun sebuah rencana kerja pembentukan *Commissie voorhet Soerabaja Werkplan* (Komisi Pembangunan Lingkungan Kota) dengan empat agenda utama sebagai berikut.

- (1) Perbaikan Jalan: Pembangunan jalan yang menghubungkan rangkaian jalur tram dan kereta dengan jalur lalu lintas umum kota;
- (2) Perbaikan Perumahan: Membangun kompleks perumahan bagi warga Pribumi yang semakin tersingkir oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Timur Asing;
- (3) Perbaikan Kesehatan: Pembangunan got dan perbaikan rumah milik warga Pribumi dan Tionghoa, saluran pembangunan air dan limbah;
- (4) Perbaikan Perdagangan: Memindahkan kantor pemerintahan ke bovenstad dan menjadikan

⁸Sejak pembentukan dewan kota, surat kabar *Soerabajasch Handelsblad* memiliki liputan khusus yang mencantumkan notulensi perdebatan yang terbit sehari setelah persidangan dewan dilakukan.

benedenstad sebagai wilayah perdagangan (*Locale Belangen*. 33. 2e Jaargang. Juni 1914).

Saat menggulirkan ide tersebut, Van Aalst telah menyadari kemungkinan munculnya perlawanan dari anggota dewan, terutama dari wakil kalangan partikelir. Metode yang dilakukannya dalam menggulirkan ide tersebut dilakukan tidak secara langsung melalui pembicaraan resmi dengan anggota dewan, tetapi terlebih dahulu disampaikan melalui *press* untuk melihat reaksi yang muncul kemudian. Seperti yang diantisipasi sebelumnya, usulan ini pada akhirnya memang menimbulkan perdebatan tajam dan perpecahan di dalam tubuh dewan kota saat itu (*"De Soerabajasche Gemeenteraad en de residen" Het Nieuws van den Dag*, 4 Agustus 1914).

Dari pihak yang mendukung, diwakili perwakilan pemerintah yang duduk di dalam dewan kota seperti Koning dan Pronge, menyampaikan beberapa argumen yang menjadikan usulan residen nampak masuk akal dan layak untuk dipertimbangkan. Menurut Pronge, usulan itu memiliki manfaat terhadap dewan kota dalam dua hal. Pertama, pemerintah kota dapat menjalankan sebuah agenda yang berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan badan-badan pemerintahan berbeda yang memiliki ikatan vertikal langsung dengan *Binnenlandsch Bestuur* di Batavia seperti *Burgerlijk Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum), *Havenwerken* (Dinas Pelabuhan) dan *Staatsspoorwegen* (Jawatan Kereta Api Negara). Sampai sekarang ini, ujar Pronge, setiap lembaga menjalankan agenda kerjanya masing-masing tanpa kaitan dengan pihak lainnya. Melalui sebuah komisi khusus di bawah residen, diharapkan koordinasi dapat berjalan di antara masing-masing lembaga (*Locale Belangen*, 1914). Dalam kaitan ini, Pronge menyampaikan sebuah fakta keras yang tidak dapat dibantah yang menjadi dasar kelambanan dan tidak efektifnya rencana-rencana kerja pemerintah kota. Pronge menyampaikan pula poin kedua yang menurutnya layak untuk menjadi pertimbangan dewan kota. Apabila dewan kota menerima rencana kerja tersebut, maka ada kemungkinan bagi lembaga tersebut mendapatkan dana pinjaman tambahan dari pemerintah pusat sebesar f 10.000.000,- dan sumbangan tahunan sebesar f 3.000.000,- (163). Sekali lagi melalui argumen ini Pronge menyampaikan sebuah problem klasik penundaan

proyek-proyek karena persoalan kekurangan dana yang dimiliki pemerintahan kota.

Persoalan terbesar yang menjadikan usulan itu mengundang perlawanan keras dari anggota dewan adalah kenyataan bahwa komite yang dibentuk akan berada langsung di bawah residen bersama dua atau tiga wakil dari dewan kota dengan anggota lainnya yang terdiri dari perwakilan pengusaha di kota Surabaya, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Pelabuhan, Kepala Dinas Jawatan Kereta Api Jalur Timur; Bupati Surabaya; Inspektur Dinas Pekerjaan Umum; Kepala Pembangunan Teknik dan Pemberantasan Pes; dan Kepala Dinas Perusahaan Trem Jawa Timur. Suara mendukung datang dari wakil-wakil dewan dari kalangan birokrasi pemerintahan seperti disampaikan Pronge yang menyatakan manfaat usulan itu bagi dewan. Menurut Pronger, pertama pemerintah kota dapat dengan mudah melakukan koordinasi terhadap badan-badan pemerintahan berbeda dengan lebih mudah mengingat wewenang Residen untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintahan seperti *Burgerlijk Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum), *Havenwerken* (Dinas Pelabuhan) dan *Staatsspoorwegen* (Jawatan Kereta Api Negara).

Penolakan keras terhadap rencana Van Aalst diwakili pernyataan Drijber, dalam surat tertulisnya terkait rencana residen sebagai berikut.

Ketua Sidang Yang Terhormat

Saya menyampaikan pandangan, terkait rapat di dalam dewan kota untuk menyusun sebuah langkah kerja di bawah Residen, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Rencana umum tentang pekerjaan yang akan dilakukan Dewan Kota di bawah arahan ambtenaar (pejabat pemerintah) adalah tidak lazim dan melanggar perundang-undangan;
- (2) Keterlibatan anggota Dewan Kota dalam pekerjaan yang ditugaskan komisi tersebut, terlepas keahlian yang mereka miliki, adalah tidak layak dan tidak sah;
- (3) Pembahasan agenda penting tanpa melibatkan keputusan publik, yang sekarang ini telah berada setengah jalan, sangat tidak diharapkan;
- (4) Dalam tahap ini, usulan pemungutan suara terhadap isu yang datang dari pihak luar, adalah langkah keliru.

Dalam poin pertama sanggahannya, Drijbe menegaskan sebuah tema lama dalam perdebatan-perdebatan di dewan kota tentang prinsip kota sebagai milik warga, sementara para birokrat dan *ambtenaar* "tempatnnya di Batavia". Prinsip utama dari pernyataan Drijbers menegaskan bahwa "intervensi" atas otonomi dewan adalah pelanggaran prinsipil di dalam sistem demokrasi lokal di dalam dewan kota. Ia juga menyatakan bahwa anggota dewan tidak perlu melakukan pemungutan suara setuju atau tidak setuju terhadap usulan residen karena sejak awal kebijakan tentang pembangunan perkotaan, sejak awal bukan wewenang para birokrat. Surat Drijber yang menjadi konsep utama dalam pidato di dewan kota, membuktikan sejauh mana kedalaman aspirasi kemandirian di kalangan wakil-wakil Eropa dari golongan partikelir.

Momen itu akhirnya menjadi ajang baru bagi anggota dewan kota yang menolak usulan residen untuk mengkampanyekan arti penting lembaga dewan kota sebagai sebuah unit pemerintahan yang mandiri dan menyalahkan langkah para pejabat kolonial yang mencoba mematikan inisiatif warga membangun kekuatan politik melalui dewan kota. "Biarkan saya sampaikan sekali lagi, bahwa saya menolak keras dalam rapat komite terhadap usulan yang digulirkan, yang memaksa anggota dewan untuk melakukan pemungutan suara, dan pemungutan suara akhirnya berujung pada kebuntuan," ujar Drijbe dalam pembukaan pidatonya yang panjang terkait isu tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan sebuah pandangan penting tentang "kota sebagai milik warga" dan menjadi urusan warga, bukan para birokrat atau *ambtenaar* di dalam birokrasi kolonial yang mewakili kepentingan pemerintah pusat di Batavia (*Locale Belangen*. 2e Jaargang, 16 September 1914. 161-162).

Penutup

Tulisan di atas menunjukkan beberapa faktor penting yang menandai dinamika politik kolonial awal abad ke-20 seiring kemunculan kelas menengah perkotaan di kota-kota kolonial Hindia-Belanda saat itu. *Pertama*, adalah kemunculan kelas menengah kota. Hal itu terjadi seiring dengan proses industrialisasi dan kemajuan ekonomi kota-kota kolonial yang semakin terintegrasi dengan ekonomi global akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. *Kedua*, perkembangan industri dan perdagangan yang didorong sektor swasta telah menjadi landasan

yang menciptakan dinamika ekonomi yang mendorong kemandirian ekonomi kelompok kelas menengah sebagai unsur penting munculnya sikap politik yang kritis terhadap kekuasaan negara. *Ketiga*, kota menjadi unit analisis penting disamping negara bangsa sebagai arena utama perwujudan kekuatan kelompok kelas menengah kota dalam menyuarakan visi dan praktik politik kewargaan modern melalui keberadaan lembaga dewan kota sebagai institusi politik yang otonom bagi warga. *Keempat*, kesadaran sosial atas kondisi kota dan bentuk kota ideal telah muncul khususnya dari kelas menengah yang diwakili oleh partikelir saja sebagai dasar dialog dan tekanan pada pemerintah kolonial. Dalam hal ini, masyarakat telah memiliki visi terhadap kota di luar rancangan kota yang dibentuk pemerintah kolonial. *Kelima*, keberadaan bentuk dialog lain yang dibuka pemerintah kolonial – di luar konfrontasi – antara kelompok kelas menengah dengan pemerintah kolonial dalam memperjuangkan kepentingan warga kota menjadi legitimasi penting muncul dan aktifnya kelas menengah kota dan lembaga kota pada fase itu.

Dengan melihat unsur-unsur penting dalam perkembangan kelas menengah perkotaan pada awal abad ke-20 dan visi politik mereka, tulisan ini menyampaikan bagaimana unsur-unsur tersebut dapat menjadi kerangka yang berguna dalam melihat kemunculan dan perkembangan kelas menengah Indonesia sekarang ini dan kemungkinan visi politik mereka *vis a vis* negara. Sejauh mana unsur-unsur itu hadir dalam proses pembentukan kelas menengah dan sejauh mana ketiadaan salah satu dari unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap sikap dan visi politik kelas menengah Indonesia kontemporer dalam kaitannya dengan perkembangan kota modern di Indonesia. Unsur-unsur penting tersebut sekaligus dapat menjadi alat berguna dalam penilaian di atas.

Daftar Pustaka

Surat Kabar

Algemeene Handelsblad (AH),

De Oostpost, 1850 - 1858

Het Nieuws van den Dag (HN), 1910 - 19

Soerabajasche Handelsblad (SH), 1890 - 1942

Buku & Artikel

- Basundoro, Purnawan. (2014) *Merebut Ruang Kota. Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Bourdieu, Pierre. Distinction (1984). *A Social Critique of the Judgment of Taste*. Massachusets: Cambridge University Press.
- Boomgard, Peter. (2004) *Anak Jajahan Belanda. Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: KITLV Jakarta.
- Clark, Peter. (2000). *British Clubs and Societies, 1580-1800. The origins of Associational World*. Oxford: Clarendon Press.
- Dick, Howard. (2003). *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Athen: Ohio University Press.
- De Graaf, H.J. (2002). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Grafiti Press.
- Departement van Economische Zaken. (1938). *Statistische Zakboekje Voor Nederlandsch-Indie*. Mededeeling No. 156. Batavia: G. Kolf & Co.
- Elout, C.K. (1930). *De Groote Oost. Reisbrieven van C.K. Elout*. Den Haag: N.V. Boekhandel.
- Faber, G.H. von. (1931). *Oud Soerabaja: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad va de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad (1906)*. Surabaya: Gemeente Soerabaia.
- _____, (1936). *Nieuw Soerabaja: De geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1936*. Surabaya: Gemeente Soerabaia.
- Frederick, William H. (1989). *Pandangan dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 – 1946)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Habermas, Jürgen. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. Cambridge & Massachusets: MIT Press.
- Kidambi, Prashant. (2007). *The Making of the Indian Metropolis*. New York: Ashgate.
- Kim, Sukkoo. (2006). "Divison of Labor and the Rise of Cities: Evidence from U.S. Industrialization, 1850-1880." *Working Paper*. Cambridge-Massachusets Avenue: National Bureau of Economic Research.
- Kol, H. Van. (1903, 24 Desember) "Uit Onze Kolonie," Surabaya: *Soerabajasch Handelsblad*.
- Onghokham. (1989). *Runtuhnya Hindia-Belanda*. Jakarta: KPG.
- Ray, Utsa. (2015). *Culinary Culture in Colonial India. A Cosmopolitan Platter and the Middle-Class*. Delhi: Cambridge University Press.
- Reid, Anthony. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*. New Haven & London: Yale University Press.
- Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. (2015). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Dari Marx sampai Agamben*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Schrieke, B. (1966). *Indonesian Sociological Studies*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2005). *Pasang surut otonomi daerah: sketsa perjalanan 100 tahun*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Yeoh, Brenda S.A. (2003). *Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations and the Urban Built Environment*. Singapore: NUS Press.